

Optimalisasi Administrasi Pembiayaan JKN Dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): Studi Kualitatif Di Puskesmas Pedamaran

Evi Desiana¹, Budi Hartono², Fillia Priscilla Simarmata³

^{1,2}Universitas Hang Tuah Pekanbaru, evidesiana93@gmail.com,
coachbuton@gmail.com

³Puskesmas Pedamaran, filliapsimarmata@gmail.com

Abstrak

Administrasi pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berperan penting dalam menjamin akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas melalui pencatatan, pelaporan, monitoring, dan pertanggungjawaban keuangan yang tertib. Namun, hasil observasi awal di Puskesmas Pedamaran menunjukkan masih terdapat berbagai kendala administrasi yang berpotensi memengaruhi efektivitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan administrasi pembiayaan JKN serta mengidentifikasi strategi optimalisasi administrasi pembiayaan JKN dalam mendukung pengelolaan keuangan BLUD di Puskesmas Pedamaran Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Puskesmas Pedamaran Kabupaten Rokan Hilir pada Juni 2026. Informan dipilih secara purposive yang terdiri atas Kepala Puskesmas, Bendahara Pengeluaran BLUD, Bendahara Penerimaan/Pengelola Kapitasi, Petugas JKN/BPJS, dan KTU/PPTK. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan data, sedangkan analisis dilakukan secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi administrasi pembiayaan JKN dipengaruhi oleh enam aspek utama, yaitu kapasitas sumber daya manusia, metode kerja, sarana dan sistem administrasi, pengelolaan dokumen, pendanaan, serta lingkungan organisasi. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi belum tersedianya SOP administrasi, pencatatan dan pelaporan yang belum sepenuhnya tepat waktu, koordinasi antarpetugas yang belum terjadwal, pengelolaan dokumen yang belum sistematis, serta monitoring administrasi yang belum terstandar. Berdasarkan temuan tersebut, strategi optimalisasi yang direkomendasikan meliputi penyusunan SOP administrasi, penyusunan alur administrasi, penetapan jadwal *cut-off* pencatatan dan pelaporan, penyediaan instrumen monitoring administrasi, serta penguatan koordinasi lintas petugas.

Kata Kunci : *administrasi pembiayaan JKN; BLUD; pengelolaan keuangan; puskesmas; studi kualitatif.*

Abstract

The administration of National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) financing plays a crucial role in ensuring the accountability and effectiveness of the financial management of Regional Public Service Agencies (Badan Layanan Umum Daerah/BLUD) at community health centers (Puskesmas) through systematic recording, reporting, monitoring, and financial accountability. However, preliminary observations at Pedamaran Community Health Center revealed several administrative challenges that may affect the effectiveness of BLUD financial management. This study aimed to analyze the implementation of JKN financing administration and to identify strategies for optimizing JKN financing administration in supporting BLUD financial management at Pedamaran Community Health Center, Rokan Hilir Regency. This study employed a qualitative approach using a case study design at Pedamaran Community Health Center, Rokan Hilir Regency, in June 2026. Informants were purposively selected and included the Head of the Community Health Center, the BLUD Expenditure Treasurer, the Revenue Treasurer/Capitation Fund Manager, JKN/BPJS officers,

and the Head of Administration/Technical Implementation Officer (KTU/PPTK). Data were collected through in-depth interviews, observations, and document reviews. Data trustworthiness was ensured through source, method, and data triangulation, while data were analyzed using thematic analysis. The findings showed that the optimization of JKN financing administration was influenced by six main aspects: human resource capacity, work methods, administrative facilities and systems, document management, funding, and the organizational environment. The main problems identified included the absence of standardized administrative operating procedures, delays in recording and reporting, unstructured coordination among personnel, inadequate document management, and the lack of standardized administrative monitoring. Based on these findings, the recommended optimization strategies include developing standard operating procedures, establishing standardized administrative workflows, implementing cut-off schedules for recording and reporting, developing administrative monitoring instruments, and strengthening cross-functional coordination.

Keywords : *JKN financing administration; BLUD; financial management; community health center (Puskesmas); qualitative study.*

Corresponding Author:

Evi Desiana

Universitas Hang Tuah Pekanbaru, evidesiana93@gmail.com

PENDAHULUAN

Universal Health Coverage (UHC) merupakan salah satu target utama pembangunan kesehatan global yang bertujuan menjamin setiap individu memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa mengalami kesulitan finansial. Pencapaian UHC tidak hanya ditentukan oleh luasnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan, tetapi juga oleh kemampuan sistem kesehatan dalam mengelola pembiayaan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa penguatan tata kelola pembiayaan kesehatan menjadi salah satu strategi penting untuk menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan, khususnya pada pelayanan kesehatan primer sebagai pintu masuk utama sistem pelayanan kesehatan.

Di Indonesia, implementasi UHC diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Peningkatan cakupan kepesertaan JKN berdampak pada bertambahnya beban administrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk Puskesmas. Selain menyelenggarakan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, Puskesmas juga bertanggung jawab melaksanakan administrasi pembiayaan JKN yang meliputi pencatatan pelayanan, pengelolaan dana kapitasi, penyusunan laporan, monitoring, dan pertanggungjawaban keuangan. Oleh karena itu, ketertiban administrasi pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) memberikan fleksibilitas kepada Puskesmas dalam mengelola sumber daya keuangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan tata kelola administrasi yang baik agar proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan dapat dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan. Dalam konteks tersebut, administrasi pembiayaan JKN menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan BLUD karena berkaitan

langsung dengan penerimaan dana, penggunaan dana, kelengkapan dokumen, serta penyusunan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan di fasilitas kesehatan dipengaruhi oleh kualitas tata kelola administrasi. Ketepatan administrasi, kelengkapan dokumen, kompetensi sumber daya manusia, kejelasan prosedur kerja, koordinasi antartugas, serta pemanfaatan sistem informasi merupakan faktor yang berperan dalam mendukung efektivitas pengelolaan dana dan pelaporan keuangan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada implementasi BLUD secara umum, pengelolaan dana kapitasi, sistem informasi keuangan, atau evaluasi kebijakan pengelolaan keuangan. Kajian yang secara khusus mengeksplorasi optimalisasi administrasi pembiayaan JKN sebagai bagian dari pengelolaan keuangan BLUD di tingkat Puskesmas melalui pendekatan kualitatif masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini.

Puskesmas Pedamaran Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu Puskesmas yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD serta memberikan pelayanan kepada peserta JKN. Hasil observasi, wawancara, dan telaah dokumen menunjukkan bahwa administrasi pembiayaan JKN telah berjalan, namun masih ditemukan beberapa kendala, antara lain belum tersedianya standar operasional prosedur administrasi yang komprehensif, belum adanya jadwal *cut-off* pencatatan dan pelaporan, koordinasi antartugas yang belum terdokumentasi secara rutin, sistem pengarsipan dokumen yang belum optimal, serta belum tersedianya instrumen monitoring administrasi yang baku. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketertiban administrasi, ketepatan waktu pelaporan, dan efektivitas pengelolaan keuangan BLUD apabila tidak dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting karena diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan administrasi pembiayaan JKN sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasinya dalam mendukung pengelolaan keuangan BLUD di Puskesmas. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan strategi perbaikan administrasi yang lebih sistematis, aplikatif, dan berkelanjutan, serta menjadi referensi bagi Puskesmas lain yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penyusunan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi administrasi pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam mendukung pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di tingkat Puskesmas melalui pendekatan kualitatif. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada implementasi BLUD, pengelolaan dana kapitasi, atau sistem informasi keuangan secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan berbagai aspek administrasi pembiayaan JKN ke dalam enam tema utama, yaitu kapasitas sumber daya manusia, standarisasi metode kerja, sarana dan sistem administrasi, pengelolaan dokumen, pendanaan, serta lingkungan organisasi. Temuan tersebut diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai tata kelola administrasi pembiayaan JKN pada Puskesmas BLUD sekaligus menjadi dasar dalam pengembangan strategi perbaikan administrasi yang lebih sistematis, aplikatif, dan berkelanjutan bagi fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan karakteristik serupa.

METODE

Kegiatan residensi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan administrasi pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam mendukung

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas Pedamaran Kabupaten Rokan Hilir. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan praktik para pelaksana administrasi pembiayaan JKN secara komprehensif sesuai dengan konteks organisasi tempat penelitian dilaksanakan.

Kegiatan dilaksanakan di Puskesmas Pedamaran Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada 8–26 Juni 2026. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena Puskesmas telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) serta menyelenggarakan pelayanan bagi peserta JKN, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji administrasi pembiayaan JKN dalam pengelolaan keuangan BLUD.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam administrasi pembiayaan JKN serta pengelolaan keuangan BLUD. Penelitian melibatkan lima informan, yang terdiri atas Kepala Puskesmas sebagai informan kunci, Bendahara Pengeluaran BLUD, Bendahara Penerimaan/Pengelola Dana Kapitasi, Petugas JKN/BPJS sebagai informan utama, serta Kepala Tata Usaha (KTU)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai informan pendukung.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan telaah dokumen. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman dan persepsi informan mengenai pelaksanaan administrasi pembiayaan JKN. Observasi dilakukan terhadap proses administrasi, koordinasi antarpetugas, serta mekanisme pencatatan dan pelaporan. Telaah dokumen digunakan untuk memperoleh informasi pendukung melalui dokumen administrasi, laporan JKN, laporan dana kapitasi, standar operasional prosedur, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan JKN dan keuangan BLUD.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Sementara itu, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan data sekunder yang berasal dari dokumen administrasi dan laporan resmi Puskesmas, sehingga meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui beberapa tahapan yang meliputi reduksi data, pemberian kode (*coding*), pengelompokan kode ke dalam kategori, identifikasi tema, interpretasi makna, serta penyusunan narasi hasil penelitian. Proses analisis dilakukan secara berulang hingga diperoleh tema-tema yang menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi administrasi pembiayaan JKN dalam mendukung pengelolaan keuangan BLUD. Tema penelitian dikembangkan berdasarkan hasil analisis akar penyebab masalah menggunakan pendekatan *fishbone diagram*, yang mencakup aspek man, method, machine, material, money, dan environment.

Penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan residensi Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Pelaksanaan penelitian telah memperoleh izin dari institusi terkait sebelum pengumpulan data dilakukan. Seluruh informan telah diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam penelitian sebelum wawancara dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, diperoleh enam tema utama yang menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi administrasi pembiayaan JKN dalam mendukung pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas Pedamaran Kabupaten Rokan Hilir. Keenam tema tersebut meliputi kapasitas sumber daya manusia, standarisasi metode kerja administrasi, pemanfaatan sarana dan sistem administrasi, pengelolaan dokumen administrasi, pemanfaatan pendanaan, serta lingkungan organisasi.

Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Administrasi Pembiayaan JKN

Hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen menunjukkan bahwa sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi optimalisasi administrasi pembiayaan JKN di Puskesmas Pedamaran. Keterbatasan jumlah tenaga administrasi menyebabkan beberapa petugas harus melaksanakan tugas rangkap sehingga beban kerja menjadi lebih tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan pencatatan, pengelolaan dokumen, serta penyusunan laporan administrasi pembiayaan JKN yang belum selalu dapat diselesaikan sesuai jadwal. Meskipun demikian, koordinasi dan kerja sama antarpetugas tetap dilakukan untuk menjaga kelancaran proses administrasi.

Petugas JKN menyampaikan bahwa tingginya beban kerja menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan administrasi pembiayaan JKN.

"...Beban kerja kami cukup tinggi karena selain mengelola administrasi JKN masih ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan, sehingga kami harus membagi waktu agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik..." (IU3)

Bendahara Pengeluaran mengungkapkan bahwa pelaksanaan administrasi pembiayaan JKN dilakukan bersamaan dengan tanggung jawab lainnya.

"...Kami masih mengerjakan tugas secara rangkap, sehingga administrasi pembiayaan JKN harus diselesaikan bersamaan dengan pekerjaan yang lain..." (IU1)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bendahara Penerimaan/Pengelola Kapitasi.

"...Pekerjaan yang kami lakukan tidak hanya administrasi pembiayaan JKN, tetapi juga tugas-tugas lainnya sehingga membutuhkan pengaturan pekerjaan yang baik..." (IU2)

Kepala Puskesmas menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia merupakan kondisi yang masih dihadapi oleh Puskesmas.

"...Kami memang masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia sehingga beberapa petugas harus melaksanakan lebih dari satu tugas..." (IK)

Kepala Tata Usaha menyampaikan bahwa kerja sama tim menjadi upaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut.

"...Seluruh petugas saling bahu-membahu membantu agar proses administrasi tetap berjalan dengan tertib dan pelayanan tidak terganggu..." (IP)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan beberapa petugas melaksanakan tugas rangkap sehingga meningkatkan beban kerja dalam pelaksanaan administrasi pembiayaan JKN. Kondisi tersebut berdampak pada proses pencatatan, penyusunan dokumen, dan pelaporan yang belum selalu dapat diselesaikan secara tepat waktu. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu upaya yang diperlukan untuk meningkatkan ketertiban administrasi pembiayaan JKN dalam mendukung pengelolaan keuangan BLUD.

Standarisasi Metode Kerja Administrasi Pembiayaan JKN

Hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen menunjukkan bahwa metode pelaksanaan administrasi pembiayaan JKN di Puskesmas Pedamaran belum sepenuhnya didukung oleh prosedur kerja yang terdokumentasi secara baku. Pelaksanaan administrasi masih mengacu pada kebiasaan kerja yang telah berlangsung, sementara Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus administrasi pembiayaan JKN belum tersedia. Selain itu, pembagian tugas administrasi belum terdokumentasi secara tertulis sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih banyak didasarkan pada pemahaman masing-masing petugas sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penelitian juga menunjukkan bahwa belum terdapat jadwal *cut-off* pencatatan dan pelaporan administrasi sehingga proses penyusunan laporan masih bergantung pada kelengkapan data dari unit terkait. Koordinasi antarunit telah dilakukan, namun masih bersifat kondisional sesuai kebutuhan pelaksanaan administrasi.

"...SOP administrasi pembiayaan JKN memang belum tersedia. Pembagian tugas juga belum dibuat secara tertulis, tetapi masing-masing petugas sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya..." (IK)

"...Selama ini kami bekerja mengikuti kebiasaan yang sudah berjalan. Penyusunan laporan juga masih menunggu kelengkapan data dari petugas lain sebelum dapat diselesaikan..." (IU1)

"...Setelah dana diterima dari kasir langsung diserahkan kepada saya untuk diproses sesuai ketentuan. Namun, belum ada batas waktu yang ditetapkan dan koordinasi dengan bendahara biasanya dilakukan apabila masih ada data yang belum lengkap..." (IU2)

"...Aplikasi yang digunakan sebenarnya sudah optimal untuk mendukung pelayanan, tetapi dalam pelaksanaannya masih sering terkendala jaringan sehingga proses administrasi terkadang menjadi lebih lambat..." (IU3)

"...Alur kerja dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Koordinasi antarunit dilakukan apabila diperlukan untuk menyelesaikan proses administrasi..." (IP)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa belum tersedianya SOP administrasi pembiayaan JKN, belum terdokumentasinya pembagian tugas, belum adanya jadwal *cut-off* pencatatan dan pelaporan, serta kendala jaringan pada penggunaan aplikasi menyebabkan pelaksanaan administrasi masih bergantung pada kebiasaan kerja dan koordinasi antarpetugas. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi konsistensi dan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi pembiayaan JKN di Puskesmas Pedamaran.

Pemanfaatan Sarana dan Sistem Administrasi Pembiayaan JKN

Hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pembiayaan JKN di Puskesmas Pedamaran telah memanfaatkan aplikasi pendukung, seperti P-Care dan E-Puskesmas, dalam proses pencatatan pelayanan peserta JKN. Meskipun demikian, aplikasi tersebut belum terintegrasi dengan administrasi pembiayaan dan pelaporan keuangan BLUD sehingga sebagian proses administrasi masih dilakukan secara manual. Selain itu, belum tersedia format monitoring administrasi yang baku sehingga pemantauan terhadap ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan dokumen, dan tindak lanjut administrasi belum terdokumentasi secara sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengendalian administrasi masih bergantung pada koordinasi antarpetugas dan pemeriksaan dokumen secara manual.

"...Belum ada aplikasi khusus yang digunakan untuk administrasi pembiayaan JKN. Format monitoring juga belum tersedia sehingga pemantauan administrasi masih dilakukan secara manual..." (IK)

"...Untuk administrasi pengeluaran tidak ada aplikasi pelaporan di Puskesmas karena seluruh proses input pelaporan masih dilakukan oleh Dinas Kesehatan..." (IU1)

"...Belum ada aplikasi khusus untuk administrasi penerimaan. Kami hanya melakukan rekapitulasi setiap bulan menggunakan Microsoft Excel..." (IU2)

"...Dalam pelayanan kami menggunakan aplikasi P-Care dan E-Puskesmas untuk pencatatan data peserta dan pelayanan. Namun, untuk monitoring administrasi pembiayaan JKN sampai saat ini belum tersedia format monitoring yang baku..." (IU3)

"...Format monitoring administrasi memang belum ada sehingga pemantauan masih dilakukan sesuai kebutuhan..." (IP)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi P-Care dan E-Puskesmas telah mendukung pencatatan pelayanan peserta JKN. Namun, belum adanya sistem yang terintegrasi untuk administrasi pembiayaan dan belum tersedianya format monitoring administrasi menyebabkan sebagian besar proses administrasi masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sarana administrasi dan sistem monitoring agar pengelolaan administrasi pembiayaan JKN dapat berlangsung lebih efektif dan terdokumentasi dengan baik.

Pengelolaan Dokumen Administrasi Pembiayaan JKN

Hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen administrasi pembiayaan JKN di Puskesmas Pedamaran masih memerlukan penyempurnaan. Dokumen administrasi telah tersedia, namun belum seluruhnya disusun menggunakan sistem pengarsipan yang seragam. Selain itu, belum tersedia *checklist* kelengkapan dokumen administrasi sehingga proses penelusuran dokumen ketika diperlukan untuk pelaporan, monitoring, maupun evaluasi masih membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi belum berjalan secara optimal dan berpotensi memengaruhi ketertiban pencatatan serta pelaporan administrasi pembiayaan JKN.

Kepala Puskesmas menyampaikan bahwa pengelolaan dokumen administrasi masih perlu ditata agar lebih sistematis.

"...Dokumen administrasi sebenarnya sudah ada, tetapi memang masih perlu ditata dengan lebih baik supaya lebih mudah saat dibutuhkan..." (IK)

Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa proses pencarian dokumen terkadang memerlukan waktu karena arsip belum tersusun secara seragam.

"...Dokumen masih disimpan sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau ada dokumen yang diperlukan, terkadang harus dicari terlebih dahulu..." (IU1)

Bendahara Penerimaan/Pengelola Kapitasi menyampaikan bahwa dokumen administrasi telah direkap setiap bulan, namun belum didukung dengan daftar pemeriksaan kelengkapan dokumen.

"...Rekapitulasi administrasi dilakukan setiap bulan, tetapi belum ada checklist khusus untuk memastikan seluruh dokumen sudah lengkap..." (IU2)

Petugas JKN menjelaskan bahwa dokumen pelayanan telah tersedia, namun pengarsipan masih dilakukan secara manual.

"...Dokumen pelayanan sudah ada, tetapi penyimpanannya masih dilakukan secara manual sehingga perlu waktu ketika dilakukan penelusuran kembali..." (IU3)

Kepala Tata Usaha menyampaikan bahwa sistem pengarsipan administrasi masih perlu disempurnakan agar lebih mudah dalam proses monitoring.

"...Arsip administrasi masih perlu dirapikan agar lebih mudah saat dilakukan monitoring maupun evaluasi..." (IP)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen administrasi yang belum sistematis menyebabkan proses penelusuran dokumen, penyusunan laporan, dan monitoring administrasi memerlukan waktu yang lebih lama. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketertiban administrasi pembiayaan JKN sehingga diperlukan sistem pengarsipan dan pengelolaan dokumen yang lebih terstruktur dalam mendukung pengelolaan keuangan BLUD.

Pemanfaatan Pendanaan dalam Mendukung Administrasi Pembiayaan JKN

Hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen menunjukkan bahwa pendanaan untuk pelaksanaan administrasi pembiayaan JKN di Puskesmas Pedamaran telah tersedia melalui pengelolaan keuangan BLUD. Namun, pemanfaatannya masih lebih diprioritaskan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan operasional rutin sehingga belum sepenuhnya diarahkan pada penguatan sistem administrasi pembiayaan JKN. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kebutuhan administrasi, seperti penyusunan instrumen monitoring, pengembangan sistem administrasi, dan penguatan tata kelola administrasi, belum dapat dilaksanakan secara optimal. Akibatnya, proses administrasi pembiayaan JKN masih dilakukan secara sederhana dan belum didukung oleh sarana administrasi yang memadai.

"...Penggunaan anggaran lebih banyak diprioritaskan untuk kegiatan pelayanan kesehatan. Untuk pengembangan administrasi dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia..." (IK)

"...Penggunaan dana harus menyesuaikan dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku sehingga belum semua kebutuhan administrasi dapat diakomodasi..." (IU1)

"...Pemanfaatan dana disesuaikan dengan kebutuhan yang telah direncanakan sehingga pengembangan administrasi dilakukan secara bertahap..." (IU2)

"...Administrasi tetap kami laksanakan sesuai kemampuan yang ada, walaupun beberapa kebutuhan pendukung administrasi belum dapat dipenuhi..." (IU3)

"...Apabila tersedia dukungan anggaran yang memadai, penguatan administrasi tentu akan lebih mudah dilakukan, terutama untuk monitoring dan pengelolaan dokumen..." (IP)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendanaan administrasi pembiayaan JKN telah tersedia, namun pemanfaatannya belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung penguatan sistem administrasi. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kegiatan pendukung administrasi belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga diperlukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendanaan dalam mendukung ketertiban administrasi pembiayaan JKN dan pengelolaan keuangan BLUD.

Lingkungan Organisasi dalam Mendukung Administrasi Pembiayaan JKN

Hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen menunjukkan bahwa lingkungan organisasi memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan administrasi pembiayaan JKN di Puskesmas Pedamaran. Koordinasi antarpetugas telah dilakukan dalam pelaksanaan administrasi, namun masih bersifat kondisional sesuai kebutuhan dan belum dilaksanakan secara terjadwal. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi administrasi belum dilakukan secara rutin serta belum didukung oleh dokumentasi hasil monitoring yang sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan tindak lanjut terhadap kendala administrasi lebih banyak dilakukan setelah ditemukan permasalahan sehingga upaya perbaikan belum berjalan secara berkelanjutan.

"...Koordinasi selalu dilakukan apabila diperlukan, tetapi memang belum ada jadwal khusus untuk membahas administrasi pembiayaan JKN secara rutin..." (IK)

"...Kami berkoordinasi apabila ada data yang belum lengkap atau ada kendala dalam penyusunan laporan sehingga pekerjaan dapat segera diselesaikan..." (IU1)

"...Koordinasi dilakukan apabila diperlukan, terutama jika terdapat perbedaan data atau dokumen yang perlu dilengkapi..." (IU2)

"...Evaluasi biasanya dilakukan apabila ada kendala dalam administrasi atau ketika ada perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti..." (IU3)

"...Monitoring administrasi masih dilakukan sesuai kebutuhan dan belum memiliki jadwal maupun dokumentasi yang baku..." (IP)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarpetugas telah berjalan dengan baik, namun masih bersifat kondisional dan belum didukung oleh mekanisme monitoring serta evaluasi yang terjadwal. Kondisi tersebut menyebabkan tindak lanjut terhadap permasalahan administrasi belum terdokumentasi secara sistematis sehingga diperlukan penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketertiban administrasi pembiayaan JKN dalam mendukung pengelolaan keuangan BLUD.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi administrasi pembiayaan JKN di Puskesmas Pedamaran dipengaruhi oleh enam aspek utama, yaitu kapasitas sumber daya manusia, standarisasi metode kerja, pemanfaatan sarana dan sistem administrasi, pengelolaan dokumen administrasi, pemanfaatan pendanaan, serta lingkungan organisasi. Keenam aspek tersebut saling berkaitan dalam mendukung ketertiban pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi administrasi pembiayaan JKN sebagai bagian dari pengelolaan keuangan BLUD.

Pembahasan

Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Administrasi Pembiayaan JKN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang memengaruhi optimalisasi administrasi pembiayaan JKN di Puskesmas Pedamaran. Keterbatasan jumlah tenaga administrasi menyebabkan beberapa petugas melaksanakan tugas rangkap sehingga meningkatkan beban kerja. Kondisi tersebut berdampak pada proses pencatatan, pengelolaan dokumen, dan penyusunan laporan administrasi pembiayaan JKN yang belum selalu dapat diselesaikan secara tepat waktu. Meskipun demikian, koordinasi dan kerja sama antarpetugas tetap dilakukan agar pelaksanaan administrasi tetap berjalan dengan baik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga, tetapi juga dengan pembagian tugas, kompetensi, dan keseimbangan beban kerja. Pelaksanaan tugas rangkap menyebabkan petugas harus membagi waktu untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan secara bersamaan sehingga berpotensi memengaruhi ketelitian pencatatan, kelengkapan dokumen, dan ketepatan waktu pelaporan administrasi pembiayaan JKN. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung tertib administrasi pembiayaan JKN.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Shafira, Arso, dan Kusumastuti (2022) yang menunjukkan bahwa proses pengadaan dan pendayagunaan sumber daya manusia pada Puskesmas BLUD di Kota Semarang belum berjalan optimal karena perencanaan kebutuhan tenaga belum sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan peningkatan beban kerja petugas sehingga pelaksanaan kegiatan di Puskesmas belum dapat berjalan secara optimal.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh literature review mengenai implementasi kebijakan BLUD di Puskesmas yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia, semangat kerja pegawai, serta dukungan pimpinan merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi BLUD. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi dan jumlah tenaga dapat menjadi hambatan dalam penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan Puskesmas.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa Puskesmas Pedamaran perlu melakukan evaluasi kebutuhan sumber daya manusia, memperjelas pembagian tugas melalui uraian tugas (*job description*), serta meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan administrasi pembiayaan JKN dan pengelolaan keuangan BLUD. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan pencatatan, ketepatan waktu pelaporan, dan akuntabilitas administrasi pembiayaan JKN sebagai bagian dari pengelolaan keuangan BLUD.

Standarisasi Metode Kerja Administrasi Pembiayaan JKN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pembiayaan JKN di Puskesmas Pedamaran belum sepenuhnya didukung oleh metode kerja yang terstandar. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus administrasi pembiayaan JKN, pembagian tugas yang belum terdokumentasi secara tertulis, serta belum adanya jadwal *cut-off* pencatatan dan pelaporan menyebabkan pelaksanaan administrasi masih bergantung pada kebiasaan kerja dan koordinasi antarpetugas. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi konsistensi, ketepatan waktu, dan ketertiban administrasi pembiayaan JKN dalam mendukung pengelolaan keuangan BLUD.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa standarisasi metode kerja merupakan komponen penting dalam mendukung tata kelola administrasi pembiayaan JKN. Keberadaan SOP memberikan kejelasan mengenai alur kerja, pembagian tanggung jawab, mekanisme koordinasi, serta prosedur pencatatan dan pelaporan. Sebaliknya, pelaksanaan administrasi yang masih bergantung pada kebiasaan kerja berpotensi menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan tugas dan memengaruhi konsistensi administrasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sulistyowati dan Sunaningsih (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan keuangan BLUD menjadi lebih tertib setelah didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP). Keberadaan SOP membantu memperjelas mekanisme kerja, meningkatkan ketertiban administrasi, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh Balishna dkk. (2025) dan Pariantini dkk. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi PPK-BLUD dipengaruhi oleh kejelasan prosedur, pembagian tugas, koordinasi antarpetugas, serta mekanisme kerja yang terdokumentasi dengan baik. Prosedur kerja yang baku mempermudah koordinasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan administrasi, dan mendukung tata kelola keuangan BLUD yang lebih tertib.

Berdasarkan temuan tersebut, penyusunan SOP administrasi pembiayaan JKN, penetapan jadwal *cut-off* pencatatan dan pelaporan, serta dokumentasi pembagian tugas secara tertulis perlu menjadi prioritas dalam upaya optimalisasi administrasi. Standarisasi metode kerja diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antarpetugas, mempercepat proses penyusunan laporan, mengurangi variasi pelaksanaan pekerjaan, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD.

Pemanfaatan Sarana dan Sistem Administrasi Pembiayaan JKN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi pembiayaan JKN di Puskesmas Pedamaran telah memanfaatkan aplikasi P-Care dan E-Puskesmas dalam proses pelayanan dan pencatatan peserta JKN. Namun demikian, aplikasi tersebut belum terintegrasi dengan administrasi pembiayaan dan pelaporan keuangan BLUD sehingga sebagian proses administrasi masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Selain itu, belum tersedianya format monitoring administrasi menyebabkan pemantauan terhadap ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan dokumen, dan tindak lanjut administrasi belum terdokumentasi secara sistematis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi telah membantu proses pelayanan, namun belum sepenuhnya mendukung tata kelola administrasi pembiayaan JKN.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi di Puskesmas belum optimal apabila belum diikuti dengan integrasi sistem administrasi dan mekanisme monitoring yang memadai. Penggunaan P-Care dan E-Puskesmas telah mendukung pencatatan pelayanan peserta JKN, tetapi belum mampu mengintegrasikan seluruh proses administrasi pembiayaan dan pelaporan keuangan. Akibatnya, petugas masih melakukan rekapitulasi data secara manual sehingga meningkatkan beban administrasi dan berpotensi menimbulkan duplikasi pekerjaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Puspa et al. (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan SIMPUS, termasuk P-Care dan E-Puskesmas, mampu mendukung pencatatan dan pelaporan pelayanan di Puskesmas. Namun, efektivitas sistem sangat dipengaruhi oleh kualitas teknologi, kesiapan organisasi, kompetensi pengguna, dan integrasi antar sistem informasi.

Temuan ini juga didukung oleh Ramadani, Nur Fadillah, dan Elly (2023) serta Pariantini, Kurniati, dan Putri (2023) yang menyatakan bahwa pengembangan sistem informasi yang terintegrasi berperan penting dalam mendukung proses administrasi, pelaporan, dan tata kelola keuangan BLUD secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Integrasi sistem mampu menyederhanakan proses administrasi, mengurangi duplikasi pekerjaan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Puskesmas.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa Puskesmas Pedamaran perlu mengembangkan sistem administrasi yang lebih terintegrasi antara pelayanan JKN, administrasi pembiayaan, dan pelaporan keuangan BLUD. Selain itu, penyusunan format monitoring administrasi secara baku diperlukan untuk mendukung proses pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap kendala administrasi sehingga ketertiban pencatatan dan pelaporan dapat terus ditingkatkan.

Pengelolaan Dokumen Administrasi Pembiayaan JKN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen administrasi pembiayaan JKN di Puskesmas Pedamaran masih memerlukan penyempurnaan. Meskipun dokumen administrasi telah tersedia, sistem pengarsipan belum disusun secara seragam dan belum didukung oleh *checklist* kelengkapan dokumen. Kondisi tersebut menyebabkan proses penelusuran dokumen, penyusunan laporan, serta monitoring administrasi masih membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Akibatnya, ketertiban pencatatan dan pelaporan administrasi pembiayaan JKN belum berjalan secara optimal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen merupakan salah satu komponen penting dalam administrasi pembiayaan JKN. Dokumen administrasi tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga sebagai bukti pertanggungjawaban, dasar penyusunan laporan keuangan, serta sumber informasi dalam proses monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, sistem pengarsipan yang belum terstruktur berpotensi

menghambat penelusuran dokumen, meningkatkan risiko ketidaklengkapan dokumen, dan memengaruhi ketepatan waktu penyusunan laporan administrasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pariantini, Kurniati, dan Putri (2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan administrasi dan pelaporan yang terdokumentasi dengan baik merupakan salah satu faktor pendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD. Seluruh proses administrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, perlu didukung oleh dokumen yang lengkap dan tersusun secara sistematis

Temuan ini juga didukung oleh penelitian mengenai kesiapan administratif Puskesmas menuju BLUD dan evaluasi sistem dokumentasi kearsipan yang menunjukkan bahwa kelengkapan dokumen, sistem pengarsipan yang terstruktur, serta standar dokumentasi yang baik berperan penting dalam meningkatkan efisiensi kerja, mempermudah monitoring dan evaluasi, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa Puskesmas Pedamaran perlu menyusun sistem pengarsipan yang lebih terstruktur, menetapkan *checklist* kelengkapan dokumen administrasi, serta menerapkan mekanisme penyimpanan dokumen yang seragam. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penelusuran dokumen, meningkatkan ketertiban administrasi, memperkuat monitoring dan evaluasi, serta mendukung pengelolaan keuangan BLUD secara lebih akuntabel.

Pemanfaatan Pendanaan dalam Mendukung Administrasi Pembiayaan JKN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendanaan untuk pelaksanaan administrasi pembiayaan JKN di Puskesmas Pedamaran telah tersedia melalui pengelolaan keuangan BLUD. Namun, pemanfaatannya masih lebih diprioritaskan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan operasional rutin sehingga belum sepenuhnya diarahkan pada penguatan sistem administrasi pembiayaan JKN. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kebutuhan administrasi, seperti penyusunan instrumen monitoring, pengembangan sistem administrasi, dan peningkatan kapasitas petugas, belum dapat dilaksanakan secara optimal. Akibatnya, penguatan tata kelola administrasi pembiayaan JKN masih dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendanaan merupakan faktor pendukung dalam optimalisasi administrasi pembiayaan JKN. Ketersediaan anggaran memungkinkan pengembangan sistem administrasi, penyediaan sarana pendukung, peningkatan kompetensi petugas, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Sebaliknya, apabila alokasi anggaran lebih difokuskan pada pelayanan operasional, penguatan administrasi cenderung dilakukan secara bertahap sehingga proses pengembangan tata kelola administrasi belum dapat berjalan secara optimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Ismail, Jusuf, dan Mokodompis (2026) yang menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana kapitasi JKN dipengaruhi oleh kualitas perencanaan anggaran, ketepatan pemanfaatan dana, serta pengawasan terhadap penggunaannya. Pengelolaan dana yang sesuai dengan perencanaan mampu mendukung peningkatan mutu pelayanan sekaligus memperkuat tata kelola organisasi di Puskesmas.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep pengelolaan keuangan BLUD yang menekankan bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan harus dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan sekaligus memperkuat tata kelola organisasi. Dalam konteks administrasi pembiayaan JKN, alokasi pendanaan tidak hanya diarahkan pada kebutuhan operasional, tetapi juga perlu mendukung pengembangan sistem administrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyediaan

sarana administrasi agar pengelolaan keuangan berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penelitian mengenai pengelolaan dana kapitasi JKN di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik, pengalokasian dana sesuai prioritas, serta kepatuhan terhadap regulasi. Pendanaan yang dikelola secara tepat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas administrasi pembiayaan JKN dan mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa Puskesmas Pedamaran perlu mengoptimalkan perencanaan penggunaan dana dengan memasukkan kebutuhan penguatan administrasi pembiayaan JKN sebagai salah satu prioritas. Penyediaan anggaran untuk penyusunan SOP, pengembangan sistem administrasi, penyusunan instrumen monitoring, serta peningkatan kapasitas petugas diharapkan mampu memperkuat ketertiban pencatatan, pelaporan, dan pengendalian administrasi sebagai bagian dari pengelolaan keuangan BLUD yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Lingkungan Organisasi dalam Mendukung Administrasi Pembiayaan JKN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan organisasi berperan penting dalam mendukung pelaksanaan administrasi pembiayaan JKN di Puskesmas Pedamaran. Koordinasi antarpetugas telah dilaksanakan dalam mendukung proses administrasi, namun masih bersifat kondisional sesuai kebutuhan dan belum dilakukan secara terjadwal. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi administrasi belum dilaksanakan secara rutin serta belum didukung oleh dokumentasi hasil monitoring yang sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan tindak lanjut terhadap kendala administrasi lebih banyak dilakukan setelah ditemukan permasalahan sehingga proses perbaikan belum berjalan secara berkesinambungan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan organisasi yang mendukung tidak hanya ditentukan oleh hubungan kerja yang baik, tetapi juga oleh tersedianya mekanisme koordinasi, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang terstruktur. Koordinasi yang hanya dilakukan ketika muncul permasalahan menyebabkan organisasi lebih bersifat reaktif dibandingkan preventif. Akibatnya, berbagai kendala administrasi baru diketahui setelah memengaruhi proses pencatatan maupun pelaporan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Balishna, Andriani, dan Efawati (2025) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PPK-BLUD di Puskesmas dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi, termasuk kepemimpinan, koordinasi organisasi, komunikasi internal, serta pengawasan yang berkelanjutan. Implementasi BLUD menjadi lebih efektif ketika setiap unit kerja memiliki koordinasi yang baik dan menjalankan mekanisme pengawasan secara konsisten.

Temuan penelitian juga didukung oleh penelitian Ariyanti, Mazidah, dan Sari (2025) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan BLUD dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pengendalian internal. Pengendalian internal yang efektif memerlukan monitoring berkala, evaluasi berkesinambungan, serta koordinasi yang baik antarunit agar setiap proses administrasi dapat berjalan sesuai prosedur.

Selain itu, penelitian Istiqomah dan Nisa (2025) mengenai implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada BLUD Puskesmas menunjukkan bahwa kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengendalian internal berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penyusunan laporan keuangan. Monitoring yang dilakukan secara terjadwal membantu organisasi mendeteksi permasalahan lebih awal

sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan sebelum berdampak pada kualitas administrasi maupun pelaporan keuangan.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa Puskesmas Pedamaran perlu menyusun mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur melalui rapat evaluasi administrasi secara berkala, penyusunan jadwal monitoring rutin, serta dokumentasi hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan. Penguatan lingkungan organisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketertiban administrasi pembiayaan JKN, memperkuat pengawasan internal, serta mendukung pengelolaan keuangan BLUD yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui identifikasi enam tema utama yang saling berkaitan, yaitu kapasitas sumber daya manusia, standarisasi metode kerja, pemanfaatan sarana dan sistem administrasi, pengelolaan dokumen administrasi, pemanfaatan pendanaan, serta lingkungan organisasi. Keenam tema tersebut dapat dipandang sebagai kerangka konseptual awal (*initial conceptual framework*) dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi administrasi pembiayaan JKN di Puskesmas BLUD. Kerangka ini menunjukkan bahwa keberhasilan administrasi pembiayaan JKN tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis administrasi, tetapi juga oleh dukungan organisasi, tata kelola, sumber daya, serta mekanisme pengendalian yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, temuan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan model konseptual maupun penelitian selanjutnya untuk menguji hubungan antar faktor tersebut pada berbagai karakteristik Puskesmas BLUD di wilayah yang lebih luas.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu Puskesmas dengan jumlah informan yang terbatas sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan ke seluruh Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD. Namun demikian, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi administrasi pembiayaan JKN dalam mendukung pengelolaan keuangan BLUD dan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dengan cakupan wilayah yang lebih luas.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi administrasi pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam mendukung pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas Pedamaran dipengaruhi oleh enam aspek utama, yaitu kapasitas sumber daya manusia, standarisasi metode kerja administrasi, pemanfaatan sarana dan sistem administrasi, pengelolaan dokumen administrasi, pemanfaatan pendanaan, serta lingkungan organisasi.

Keterbatasan sumber daya manusia yang ditandai dengan tugas rangkap, belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus administrasi pembiayaan JKN, belum terintegrasinya sistem administrasi dan format monitoring, pengelolaan dokumen yang belum sistematis, pemanfaatan pendanaan yang belum sepenuhnya mendukung penguatan administrasi, serta koordinasi, monitoring, dan evaluasi yang belum dilakukan secara terjadwal menjadi faktor yang memengaruhi ketertiban pencatatan, pelaporan, dan pengendalian administrasi pembiayaan JKN.

Sebagai tindak lanjut, penelitian ini menghasilkan rekomendasi berupa penyusunan SOP administrasi pembiayaan JKN, penetapan jadwal *cut-off* pencatatan dan pelaporan, penyusunan format monitoring administrasi, penguatan sistem pengarsipan dokumen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan

koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas administrasi pembiayaan JKN sehingga mampu mendukung pengelolaan keuangan BLUD yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas Pedamaran Kabupaten Rokan Hilir yang telah memberikan izin dan dukungan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan penelitian yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang diperlukan. Selain itu, penulis menyampaikan penghargaan kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru atas bimbingan, arahan, dan dukungan selama penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Achadi, E. L., Taher, A., Wirawan, F., Sungkar, S., Sudarmono, P., Shankar, A. H., Thabrany, H., & The Indonesian Health Systems Group. (2019). Universal health coverage in Indonesia: Concept, progress, and challenges. *The Lancet*, 393(10166), 75–102.
- Ariyanti, I., Mazidah, N., & Sari, I. P. (2025). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Kabupaten Blora. Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 1203–1209.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2024). Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2023. Jakarta: BPJS Kesehatan.
- Bahri, S., Azlina, N., & Nasir, A. (2024). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, kualitas sumber daya manusia, dan sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). *Jurnal Current*, 2(1)
- Balishna, M., Andriani, R., & Efawati, Y. (2025). *Analysis of the Implementation of Financial Management Patterns of Regional Public Service Agencies (PPK-BLUD) at Tanjungsari Health Center*. *International Journal Administration, Business & Organization*, 6(2), 148-161.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Cashin, C., Sparkes, S., & Bloom, D. (2017). Earmarking for health: From theory to practice. Geneva: World Health Organization.
- Desmita, E. (2022). Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018. *Jurnal Niara*, 15(1), 137–145.
- Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2025). *Laporan Kinerja Dewan Jaminan Sosial Nasional Tahun 2024*.
- Dinas Kesehatan Provinsi Riau. (2025). *Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2024*. Pekanbaru: Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
- Hasibuan, I. D. (2024). Pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Rustida*, 11(1), 1–10.
- Ismail, N., Jusuf, H., & Mokodompis, Y. (2026). *Efektivitas praktik pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas Pilolodaa*. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1618–1625.

- Istiqomah, N. A., & Nisa, F. (2025). *Analisis implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam kinerja pelayanan dan penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah: Studi pada BLUD Puskesmas Pabedilan, Kabupaten Cirebon*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(1), 598–618.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN Kita: Kinerja dan Fakta Edisi Maret 2025*.
- Kruk, M. E., Gage, A. D., Arsenault, C., Jordan, K., Leslie, H. H., Roder-DeWan, S., Adeyi, O., Barker, P., Daelmans, B., Doubova, S. V., English, M., Elorrio, E. G., Guanais, F., Gureje, O., Hirschhorn, L. R., Jiang, L., Kelley, E., Lemango, E. T., Liljestrand, J., ... Pate, M. (2018). High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: Time for a revolution. *The Lancet Global Health*, 6(11), e1196–e1252.
- Mawarni, E. A., & Wuryani, E. (2020). Analisis kinerja Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD): Studi pada Puskesmas Krian Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9(1), 1–11.
- Media Center Riau. (2025). *UHC Riau Capai 99,02 Persen, Bukti Nyata Komitmen Gubernur Tingkatkan Layanan Kesehatan*. Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau.
- Media Center Kabupaten Rokan Hilir. (2024). *Kabupaten Rokan Hilir mencapai Universal Health Coverage (UHC)*.
- Media Center Kabupaten Rokan Hilir. (2025). *Forum komunikasi pemangku kepentingan BPJS Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir*.
- Misnaniarti, M., & Najmah, N. (2019). Analisis kesiapan Puskesmas dalam pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 1–10.
- Norhikmah. (2024). Implementasi kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Studi pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru). *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 6(2).
- Novyandina, J., Noerjoedianto, D., & Sari, R. (2025). Analisis pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Muara Bungo I Kabupaten Bungo. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 13(1), 99–109.

- Pariantini, N. P. D., Kurniati, N. M., & Putri, K. F. A. (2023). *Analisis penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Bangli Tahun 2022*. Jurnal Kesehatan, Sains, dan Teknologi (JAKASAKTI), 2(3).
- Parulian, A. P., Nababan, D., Tarigan, F. L., Wandra, T., & Sitorus, M. E. J. (2024). *Utilization of National Health Insurance capitation funds at Puskesmas: A qualitative study in Medan Labuhan Subdistrict, Medan City*. Jurnal Prima Medika Sains, 6(1), 65–71.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pratiwi, E. (2024). Analisis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di BLUD UPTD Puskesmas Konda. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 9(1), 1–12.
- Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru. (2026). Panduan Residensi Kesehatan Masyarakat Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru T.A. 2025/2026. Pekanbaru: Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- Puskesmas Pedamaran. (2025). Profil Kesehatan Puskesmas Pedamaran Tahun 2025. Pedamaran: Puskesmas Pedamaran.
- Puspa, S. K. A., Dewi, E. P., & Umniyatun, Y. (2024). *Evaluasi penerapan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dengan model Human, Organization, Technology (HOT)-Fit di Puskesmas Tambun Bekasi Tahun 2022*. Jurnal Kesehatan Komunitas, 9(3), 588-598.
- PPID Provinsi Riau. (2024). *Pemprov Riau Terus Berupaya Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional*. Pekanbaru: PPID Provinsi Riau.
- Ramadani, N., Nur Fadillah, R., & Elly, N. (2023). *Penggunaan aplikasi Primary Care BPJS di Puskesmas Lingkar Barat*. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan (Health Information Management), 7(2), 40–51.
- Sabillah, E. F., & Sari, I. P. (2022). Evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas. Jurnal Sosial dan Teknologi, 2(7), 580–590.
- Shafira, A. D., Arso, S. P., & Kusumastuti, W. (2022). Pengadaan dan pendayagunaan SDM Puskesmas sebagai BLUD di Kota Semarang. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 21(2), 81–88.
- Sulistiyowati, H. (2023). Implementasi pengelolaan keuangan Puskesmas setelah berstatus Badan Layanan Umum Daerah. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 10(1), 45–56.
- Sutaryo, S., dkk. (2024). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*
- Thabrany, H. (2015). Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.
- Toiyo, H. B. (2022). Analisis pengelolaan dana kapitasi BPJS pada Puskesmas Likupang. Jurnal Akuntansi Manado, 3(2), 120–130.
- World Bank. (2021). World development report 2021: Data for better lives. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2025). *World Development Indicators 2025*.
- World Health Organization. (2020). Country assessment guide: The health financing progress matrix. Geneva: World Health Organization.

- World Health Organization & World Bank. (2023). Tracking universal health coverage: 2023 global monitoring report. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2025). *World health statistics 2025: Monitoring health for the Sustainable Development Goals (SDGs)*. Geneva: World Health Organization